



## **ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK: IDENTIFIKASI DAN PERUMUSAN MASALAH**

Eka Wardatul Asfiah<sup>1</sup>, Putri Oktaviana Ramadhani<sup>2</sup>, Hendrik  
Yulianto<sup>3</sup>, Putra Pratama Ksatria Yudha<sup>4</sup>, Muhammad Iqbal  
Alamsyah<sup>5</sup>, Revo Alghazar Egimanda<sup>6</sup>, Ria Angin<sup>7</sup>  
Universitas Muhammadiyah Jember

<sup>1</sup> FISIP, Ilmu Pemerintahan, ekawardatulasfiah5@gmail.com, Universitas Muhammadiyah Jember

<sup>2</sup> FISIP, Ilmu Pemerintahan, oktaviaramadhan533@gmail.com, Universitas Muhammadiyah Jember

<sup>3</sup> FISIP, Ilmu Pemerintahan, hedrikyulianto003@gmail.com, Universitas Muhammadiyah Jember

<sup>4</sup> FISIP, Ilmu Pemerintahan, satria7673@gmail.com, Universitas Muhammadiyah Jember

<sup>5</sup> FISIP, Ilmu Pemerintahan, iqbalalamsyah982@gmail.com, Universitas Muhammadiyah Jember

<sup>6</sup> FISIP, Ilmu Pemerintahan, egimegim09@gmail.com, Universitas Muhammadiyah Jember

<sup>7</sup> FISIP, Ilmu Pemerintahan, ria.angin@umuhjember.ac.id, Universitas Muhammadiyah Jember

### **ABSTRAK**

Analisis kebijakan Publik: identifikasi dan perumusan masalah sangat penting untuk tercapainya suatu kebijakan dan dapat dicapai secara maksimal. Untuk mengidentifikasi masalah dan merumuskan masalah dalam pembuatan kebijakan perlu diketahui proses, tahapan dan langkah langkah identifikasi dan perumusan masalah tersebut. Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengamati, mempelajari dan mendapatkan informasi terhadap proses dan tahapan tahapan dalam pembuatan kebijakan. Metode penulisan ini menggunakan study perpustakaan. Penulisan artikel ini dilakukan dengan mengkaji 15 artikel yang berkaitan dengan kebijakan publik, konsep pembuatan kebijakan yang ada di goggle scholar. Dari hasil mengkaji dan mempelajari ditemukan beberapa definisi tentang identifikasi masalah dan bagaimana perumusan masalah serta tahapan-tahapan nya yaitu Pengenalan Masalah, definisi, spesifikasi, penetapan prioritas masalah. Pada tahapan ini dalam pembuatan kebijakan yaitu Identifikasi Tanda-tanda Adanya Masalah, Memahami Konteks dan Latar Belakang, mendefinisikan dan membatasi masalah, menganalisis akar permasalahan, merumuskan pernyataan masalah, pengkajian ini menemukan bahwa salah satu tahapan dalam pembuatan kebijakan yaitu mengidentifikasi dan perumusan masalah kebijakan.

Kata kunci: kebijakan, identifikasi, perumusan,

## **Pendahuluan**

"Kebijakan" berbeda dari "pengetahuan" atau "kebaikan". Politik adalah istilah yang digunakan untuk mengacu pada prinsip atau tindakan ini yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan. Kebijakan, seperti yang dinyatakan oleh Ealau dan Prewitt (1973), didefinisikan sebagai keputusan yang dapat diterapkan yang ditandai dengan tindakan yang berulang dan konsisten dari mereka yang menciptakannya dan mengikutinya. Titmuss (1974) mengatakan bahwa politik selalu berfokus pada masalah dan pada tindakan, dan bahwa kebijakan adalah pedoman prinsip tindakan yang diarahkan pada tujuan tertentu.

Kebijakan dapat didefinisikan sebagai suatu peraturan yang mencakup prinsip-prinsip sebagaipedoman untuk melakukan sesuatu secara teratur dan terencana untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Baik kebijakan yang dibuat oleh pemerintah atau yang dibuat oleh institusi, komunitas bisnis, organisasi nirlaba, dan organisasi nirlaba pada umumnya, selalu menjadi perdebatan dankontroversi. Selalu terlibat dalam diskusi kebijakan, baik di dalam maupun di luar organisasi. Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami konsep kebijakan sebelum melanjutkan dengan analisis kebijakan publik. Politik adalah upaya untuk mencapai tujuan, nilai, dan praktik yang diinginkan (Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan). Carl J.Friedrick mengartikan kebijakan sebagai kebijakan yang diusulkan dalam lingkungan tertentu oleh individu, kelompok, atau pemerintah dengan menunjukkan hambatan dan peluang pelaksanaan kebijakan tersebut untuk mencapai tujuan tertentu.

Kebijakan publik didefinisikan sebagai keputusan dan tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pembagian sumber daya alam, keuangan, dan manusia untuk kepentingan umum, yaitu individu, komunitas, negara, dan masyarakat. Dalam proses ini, kebijakan publik dianggap sebagai hasil dari kerja sama, atau bahkan konflik, antara berbagai kepentingan dan ide yang membentuk sistem politik negara. Karena itu, kebijakan adalah alat yang digunakan pemerintah untuk melakukan sesuatu dalam bidang tertentu, seperti transportasi, fasilitas umum, pendidikan, kesehatan, perumahan, dan kesejahteraan. Kebijakan publik yang efektif dimulai dengan memahami akar masalah. Para pemimpin saling berinteraksi dan melakukan interelasi didalam setiap tahap pembuatan kebijakan publik (R. Angin, A.S Manggala, 2022). Identifikasi dan Langkah penting dalam proses pengambilan kebijakan adalah menyusun masalah kebijakan untuk menghasilkansolusi yang tepat sasaran.

## **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode study perpustakaan atau rewiuw literature. Untuk menulis artikel ini, menggunakan database google scholar digunakan untuk memeriksa lima belas artikel yang berkaitan dengan kebijakan publik dan konsep pembuatan kebijakan. Hasilnya disajikan dalam artikel ilmiah.

## **Hasil dan Pembahasan**

Ada beberapa cara untuk memahami definisi masalah dan prosedur yang digunakan untuk menemukan identifikasi dan tahapan untuk merumuskan masalah kebijakan. yang dijelaskan sebagai berikut

### **1. Identifikasi masalah kebijakan**

Mengidentifikasi isu kebijakan merupakan langkah mendasar dalam mengembangkan kebijakan yang efektif dan tepat sasaran. Pemahaman menyeluruh mengenai penyebab masalah akan membantu dalam pembuatan kebijakan dan mengembangkan solusi yang tepat dan meminimalkan potensi dampak negatif. Terlepas dari tantangan yang ada, penting untuk terus mengembangkan metode dan strategi yang lebih baik dalam mengidentifikasi permasalahan guna mengembangkan kebijakan berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat. Identifikasi masalah kebijakan melibatkan penemuan, pendefinisian, dan analisis situasi yang memerlukan intervensi kebijakan. Hal ini mencakup pengumpulan data, analisis informasi, dan konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk memahami sepenuhnya penyebab masalah. Mewaspadaai isu-isu politik sangatlah penting. Dengan memahami penyebab permasalahan, kita dapat mengembangkan kebijakan yang secara spesifik menargetkan solusi yang diperlukan dan meningkatkan efektivitasnya. Kebijakan yang didasarkan pada identifikasi masalah yang akurat akan lebih mungkin mencapai tujuannya. Mengenali suatu masalah kebijakan memerlukan tindakan untuk memahami apa yang terjadi dengan masalah atau isu yang terjadi

### **2. Tahap-tahap Identifikasi dan Perumusan Masalah Kebijakan**

Proses identifikasi dan perumusan masalah kebijakan umumnya terdiri dari beberapa tahap:

### **a. Pengenalan Masalah (Problem Sensing)**

Pada tahap pertama ini, menemukan indikasi masalah. Ini dapat dicapai melalui observasi langsung, pengaduan masyarakat, media massa, dan laporan penelitian. Pada tahap ini, diperlukan pemahaman yang sangat rinci tentang masalah kebijakan. Anda harus memahami secara menyeluruh dari mana masalahnya dimulai.

### **b. Pendefinisian Masalah (Problem Definition)**

Pada tahap ini, masalah didefinisikan secara jelas dan eksplisit. Pada tahap ini memberikan penjelasan menyeluruh tentang jenis-jenis masalah efeknya dan siapa yang paling terpengaruh pada masalah tersebut. Pada tahapan pendefinisian masalah telah dirumuskan secara jelas dan terukur mengenai masalah yang ingin dan perlu diatasi. Hal ini menjadi dasar bagi langkah selanjutnya dalam proses pembuatan seperti analisis, mencari formulasi solusi dan implementasi. Dengan mendefinisikan masalah secara jelas, pembuatan kebijakan dapat memfokuskan analisis mereka pada elemen-elemen yang paling penting dan membuat solusi yang tepat sasaran.

### **c. Spesifikasi Masalah (Problem Specification)**

Faktor penyebab, konsekuensi, dan tren yang terkait dengan masalah tersebut diidentifikasi dengan melakukan analisis menyeluruh. Hal ini membantu dalam pembuatan pertanyaan penelitian yang tepat untuk dianalisis. memberikan perhatian khusus pada komponen yang paling penting dalam analisis. Merancang solusi yang tepat sasaran. Memudahkan komunikasi antar pemangku kepentingan selama proses tahapan kebijakan. Selain itu, memungkinkan penyelidikan menyeluruh tentang kinerja kebijakan.

### **d. Penetapan Prioritas Masalah (Agenda Setting)**

Agenda setting adalah proses memasukkan masalah publik ke dalam agenda pemerintah untuk dibahas dan ditindaklanjuti melalui kebijakan. Sebelum perumusan kebijakan, ada proses yang disebut agenda setting. Setiap masalah memiliki tingkat kepentingan yang berbeda. Pada tahap ini, penilaian dilakukan untuk menentukan masalah mana yang harus ditangani terlebih dahulu. Penyusunan agenda Untuk membuat agenda perumusan kebijakan, Anda harus mengidentifikasi asumsi yang tersembunyi, mengidentifikasi faktor penyebabnya, menentukantujuan yang dapat dicapai, menggabungkan berbagai input, dan merancang peluang untuk membuat kebijakan baru. Agenda kebijakan dapat disusun oleh berbagai pihak, seperti

eksekutif (instansi yang berhubungan dengan masalah), legislatif (melalui komisi atau fraksi) dan swasta untuk kepentingan mereka sendiri.

### **3. Teknik-teknik Pengumpulan Data dan Informasi**

Berbagai teknik pengumpulan data dan informasi dapat digunakan untuk membantu proses identifikasi dan perumusan masalah kebijakan. Teknik-teknik ini termasuk:

- a. Studi Literatur: Mempelajari literatur ilmiah, laporan penelitian, dan publikasi terkait untuk mendapatkan pemahaman tentang konteks dan wawasan masalah.
- b. Data Statistik: Mengumpulkan dan menganalisis data statistik dari berbagai sumber, seperti survei, sensus, dan data administrasi, untuk mengukur dampak dan tren masalah.
- c. Pendekatan Kualitatif : Melakukan wawancara, observasi, diskusi grup dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang pengalaman dan perspektif mereka terkait masalah.

### **4. Proses Perumusan Kebijakan Publik Perumusan Masalah (*Defining Problem*)**

Menentukan masalah adalah langkah yang paling penting. Agar kebijakan dapat dibuat dengan baik, masalah publik harus dipahami dengan baik. Pada dasarnya, kebijakan publik bertujuan untuk memecahkan masalah masyarakat. Karena perumusan masalah yang salah akan menyebabkan kebijakan yang salah juga, langkah ini harus dilakukan dengan hati-hati. Seringkali, kita gagal menemukan pemecahan masalah yang tepat daripada mengidentifikasi masalah itu sendiri (Rushefky, 2008).

Perumusan masalah kebijakan sangat penting. Sebelum masalah kebijakan dimasukkan ke dalam agenda kebijakan pemerintah dan kemudian menjadi kebijakan. Ini berarti memberi arti atau menerjemahkan masalah kebijakan secara benar, tanpa terlebih dahulu memasuki agendasetting. Dalam situasi ini, perumusan masalah terdiri dari empat fase yang saling bergantung, yaitu pencarian masalah, pendefinisian masalah, spesifikasi masalah, dan pengendalian masalah. Pengakuan atau persepsi bahwa situasi masalah ada dimulai dengan perumusan masalah. Salah satu cara untuk menyelesaikan situasi masalah adalah dengan mengidentifikasi masalah. Semua masalah ini dapat diselesaikan secara bersamaan, tetapi kita harus menentukan mana yang dianggap sebagai masalah publik terlebih dahulu. Identifikasi masalah kebijakan, penyusunan agenda, membuat proposal, dan pengesahan rumusan kebijakan adalah semua bagian dari prosedur perumusan kebijakan.

### **Adapun proses perumusan kebijakan sebagai berikut:**

1. Identifikasi Kebijakan: dalam mengidentifikasi kebijakan akan sangat memakan waktu yang dihabiskan untuk membuat kebijakan dan menyelesaikan masalah kebijakan. Kebijakan yang salah dalam perumusan kebijakan akan memiliki konsekuensi yang sangat mengerikan, dan kebijakan yang dibuat juga kemungkinan besar akan menghadapi tantangan dan hambatan yang signifikan di lapangan. Kesalahan dalam merumuskan masalah dapat mengarah pada kesalahan di langkah-langkah berikutnya, bahkan kesalahan dalam mengembangkan kebijakan.
2. Membuat Agenda Kebijakan Masalah: Masalah dirumuskan, kemudian diprioritaskan yang paling penting hingga yang paling tidak penting. Sangat penting untuk memprioritaskan masalah dari yang paling penting ke yang paling tidak penting karena tidak mungkin untuk mengatur semua masalah secara berurutan.
3. Membuat Proposal Kebijakan: Proposal kebijakan sebagai kumpulan tindakan untuk membangun dan mengembangkan solusi alternatif untuk memecahkan masalah kebijakan. Mereka melakukan hal-hal berikut: mengidentifikasi alternatif untuk masalah kebijakan, menciptakan dan mendefinisikan alternatif pemecahan masalah, mengevaluasi masing-masing alternatif untuk menentukan apakah mereka dapat dilaksanakan, dan akhirnya memilih solusi terbaik.
4. Pengesahan Rumusan Kebijakan: Setelah perumusan kebijakan selesai disetujui, rumusan baru dianggap lengkap. Pengesahan, juga dikenal sebagai legalitas, adalah alternatif konstitusional untuk memecahkan masalah terpilih. Untuk membuat kebijakan, Anda harus melihat apa yang terjadi pada masalah atau masalah masyarakat (Ali Wafa, Ria Angin, 2024).

### **Ada beberapa langkah dalam proses perumusan masalah kebijakan, sebagai berikut:**

1. Identifikasi Tanda-tanda Adanya Masalah: Selama proses pembuatan kebijakan, penting untuk mempertimbangkan berbagai tanda-tanda yang menunjukkan adanya masalah. Contohnya termasuk ketidakpuasan publik, ketidaksesuaian antara keadaan ideal dan kenyataan, tren statistik negatif, keluhan dan laporan masyarakat, dan konflik antar kelompok atau organisasi.
2. Memahami Konteks dan Latar Belakang: Dalam proses ini, penting untuk mempelajari norma dan prinsip masyarakat, tren dan masalah yang berkembang, pihak-pihak yang terlibat dalam masalah kebijakan, dan kebijakan sebelumnya yang terkait dengan masalah tersebut.

3. Mendefinisikan dan Membatasi Masalah: Dalam mendefinisikan masalah kebijakan, Anda harus menjelaskan secara rinci apa yang ingin diatasi, dengan mempertimbangkan kompleksitas dan luasnya masalah tersebut.
4. Menganalisis Akar Permasalahan: Pada tahap ini, seseorang harus melakukan analisis mendalam untuk memahami faktor-faktor yang berkontribusi terhadap munculnya masalah, menemukan bagaimana masing-masing faktor berhubungan satu sama lain, dan menentukan faktor mana yang paling penting untuk diperbaiki.
5. Merumuskan Pernyataan Masalah Kebijakan: Fokus pada kebijakan yang dapat diambil untuk menyelesaikan masalah dan buat pernyataan yang ringkas, jelas, dan terukur.

## **Kesimpulan**

Mengidentifikasi dan perumusan masalah kebijakan sangat penting untuk tercapainya suatu kebijakan dan dapat di capai secara maksimal. Untuk mengidentifikasi masalah dan merumuskan masalah dalam pembuatan kebijakan perlu diketahui proses, tahapan dan langkah langkah identifikasi dan perumusan masalah tersebut. Proses identifikasi dan perumusan masalah dalam pembuatan kebijakan sangat penting. Untuk mengetahui proses mengidentifikasi masalah Kebijakan memiliki beberapa proses identifikasi dan perumusan masalah kebijakan, yang biasanya terdiri dari beberapa tahap: Pengenalan Masalah, Pendefinisian, Spesifikasi dan Penetapan Prioritas Masalah.

Pada tahapan perumusan masalah dalam pembuatan kebijakan yaitu Identifikasi Tanda-tanda Adanya Masalah, Memahami Konteks dan Latar Belakang, mendefinisikan dan membatasi masalah, menganalisis akar permasalahan, merumuskan pernyataan masalah, pengkajian ini menemukan bahwa salah satu tahapan dalam pembuatan kebijakan yaitu mengidentifikasi dan perumusan masalah kebijakan.

## Daftar Pustaka

- Akib, H.(2010). Implementasi kebijakan: apa, mengapa, dan bagaimana. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(1), 1-11.
- Angin, R., Manggala, A.S.,(2022). Mengapa Agenda Kebijakan Pemerintah Diabaikan: Studi Konflik PT. Imasco Asiatic dan Petani di Kabupaten Jember. *Pustaka Abadi*. Jember
- Cristianingsih, E.(2020). Implementasi kebijakan administrasi Kependudukan di kabupaten bandung. *Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi*, 12(2).
- Dunn, W. N.(2001). Analisis Kebijaksanaan Publik.
- Dwinugraha, A. P.(2016). Agenda Kebijakan Lingkungan Berkelanjutan: Studi Perumusan Masalah (Konsekuensi Kemajuan Pembangunan Ekonomi Daerah Kabupaten Banyuwangi). *Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 6(1).
- Herdiana, D.(2018). Sosialisasi kebijakan publik: Pengertian dan konsep dasar. *Jurnal Ilmiah Wawasan Insan Akademik*, 1(3), 13-26.
- Mariana, D.(2010). Otonomi Daerah dan Inovasi Kebijakan. *governance*, 1(1), 13-20.
- Meutia, I. F.(2017). Analisis kebijakan publik.
- Muadi, S., Ismail, M. H., & Sofwani, A. (2016). Konsep dan kajian teori perumusan kebijakan publik. *JRP (Jurnal Review Politik)*, 6(2), 195-224.
- Negara, L. A.(2008). Analisis Kebijakan Publik. Modul Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. Jakarta.
- Permatasari, I. A.(2020). Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan). *TheJournalish: Social and Government*, 1(1), 33-37.
- Suaib, H., Rakia, A. S. R., Purnomo, A., & Ohorella, H. M. (2022). Pengantar Kebijakan Publik. *Humanities Genius*.
- Supiana, S., & Zaqiah, Q. Y. (2021). Perumusan Masalah Kebijakan. *Ad-Man-Pend: Jurnal Administrasi Manajemen Pendidikan*, 4(1), 25-43.
- Wafa, A., Angin, R.(2024). Formulasi Kebijakan Program Banyuwangi Hijau, dalam Mewujudkan Pengelolaan Sampah Berkelanjutan (Studi di Desa Bunder, Kecamatan Kabat). *JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK VOLUME 9 (1)*, 1-14. ISSN PRINT : 2502-0900, ISSN ONLINE : 2502-2032
- Widodo, J. (2021). Analisis kebijakan publik: Konsep dan aplikasi analisis proses kebijakan publik. *Media Nusa Creative (MNC Publishing)*.